

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas Perdagangan merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari masyarakat menengah ke atas atau menengah kebawah. Setiap orang memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berdagang, tak terkecuali untuk masyarakat menengah kebawah yang bermodal kecil dan tidak mempunyai tempat usaha tetap. Hal inilah yang menjadi alasan banyak Pedagang Kaki Lima /PKL ikut andil dalam berdagang. Karena PKL sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal.

Banyaknya Jumlah PKL, maka dipandang perlu ada perhatian pemerintah. Terkhusus pemerintah Daerah Kota/Kabupaten untuk menata dan memberdayakan para pedagang. Karena dalam aktivitasnya tentu dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan (*Growth Pole*), yang secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut.

Salah satu daerah yang memiliki daya tarik sebagai pusat pertumbuhan usaha/perdagangan ialah Kabupaten Garut yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih banyak para PKL, karena perdagangan

berperan penting sebagai mata pencaharian masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1
DATA PKL PERKOTAAN KABUPATEN GARUT

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jl. Siliwangi	136	Dibagi 3 kelompok dagangan
2	Jl. Ciledug 1 s/d 2	172	1. Bodasan
3	Jl. Ahmad Yani	340	2. Makanan
4	Jl. Cikuray	192	3. Buah-Buahan
5	Jl. Alun- alun Gedung Pendopo s/d Gerbang Mesjid Agung	63	
6	Jl. Pasar Baru A s/d F	295	
	JUMLAH TOTAL	1198	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar kabupaten garut 2016

Pada tabel 1.1. terlihat perkembangan jumlah PKL begitu pesat, karena itulah perlu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk mengatur aktivitas Pedagang Kaki Lima, sehingga terwujudnya penataan pedagang yang terkelola dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Daerah, tentunya ada Kebijakan pula dalam menata PKL di Kabupaten Garut yang semakin berkembang.

Maka dalam rangka penataan PKL Pemerintah Daerah Kabupaten Garut membangun gedung khusus para PKL, yaitu Gedung PKL 1 di Blok

Pajagalan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Gedung PKL 2 di Jl. Guntur Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagai lokasi PKL yang bersifat permanen.

Sehubungan lokasi PKL tersebut belum dapat menampung seluruh pedagang yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota yang mencapai lebih dari 1000 pedagang, sedangkan daya tampung Gedung PKL 1 berjumlah 227 lapak dan Gedung PKL 2 berjumlah 321 lapak, dengan daya tampung kedua gedung tersebut hanya 548 lapak. Maka Pemerintah Daerah menetapkan lokasi PKL yang bersifat sementara dengan menggunakan ruang manfaat jalan pada lokasi yang berada di sekitar kawasan gedung.

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. ADMREK/ 2015 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. Menetapkan Lokasi Sementara bagi Kegiatan Usaha PKL di Wilayah Kecamatan Garut Kota, meliputi :

- a. Jl. Ciwalen (Mulai dari pertigaan Jl. Guntur sampai dengan jembatan Ciwalen);
- b. Jl. Pasar Baru (Mulai dari rel kereta api sampai dengan pertigaan Jl. Guntur);
- c. Jl. Mandalagiri (Mulai dari pertigaan Jl. Mandalagiri- Jl. Mawar sampai dengan pertigaan Jl. Guntur);
- d. Jl. Guntur (Depan Garut Plaza sampai dengan gedung PKL 1);
- e. Jl. Pramuka (Halaman Gedung Dakwah Kabupaten Garut).

Namun fenomena yang ditemui untuk melakukan penataan PKL dengan merelokasi para pedagang ke Gedung PKL 1 dan 2 serta lokasi (jalan) yang telah ditentukan mengalami kendala. Dimana banyak pedagang yang berjualan di gedung dan lokasi (jalan) yang telah ditentukan tersebut, dan masih banyak yang berjualan ditempat biasa yaitu di Jl. A. Yani, Jl. Siliwangi, Jl. Ciledug, Jl. Cikuray, Jl. Alun-alun, Jl. Pasar Baru.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/2015 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha PKL di Wilayah Kecamatan Garut Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih menemui kendala atau masalah. Berdasarkan pengamatan, observasi awal penulis menemukan indikasi permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Belum tertatanya PKL untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan.
2. Belum adanya cara efektif untuk merelokasi PKL.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, ialah Seberapa besar pengaruhimplementasi kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap eektivitas penataan kegiatan usaha PKLdi wilayah Kecamatan Garut Kota ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap efektifitas penataan kegiatan usaha PKLdi wilayah Kecamatan Garut Kota.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan keilmuan yang berkenaan dengan administrasi publik dan khususnya kebijakan dalam implementasi kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Instansi

Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memahami implementasi kebijakan publik.

c. Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi merupakan langkah yang penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak diimplementasikan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan.¹

Selayaknya Van Meter dan Van Horn, menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:²

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana

¹ Leo Agustino Implementasi Kebijakan Publik Bandung. CV. Pustaka Setia. 2012 Hal 139

² Deddy Mulyadi Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik). Bandung Alfabeta 2015. Hal 72

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Disposisi implementor

Selain dari implementasi kebijakan, peneliti akan menjelaskan mengenai efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dalam mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang telah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan³

Menurut pendapat David Krech, Ricard . Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *individual and society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

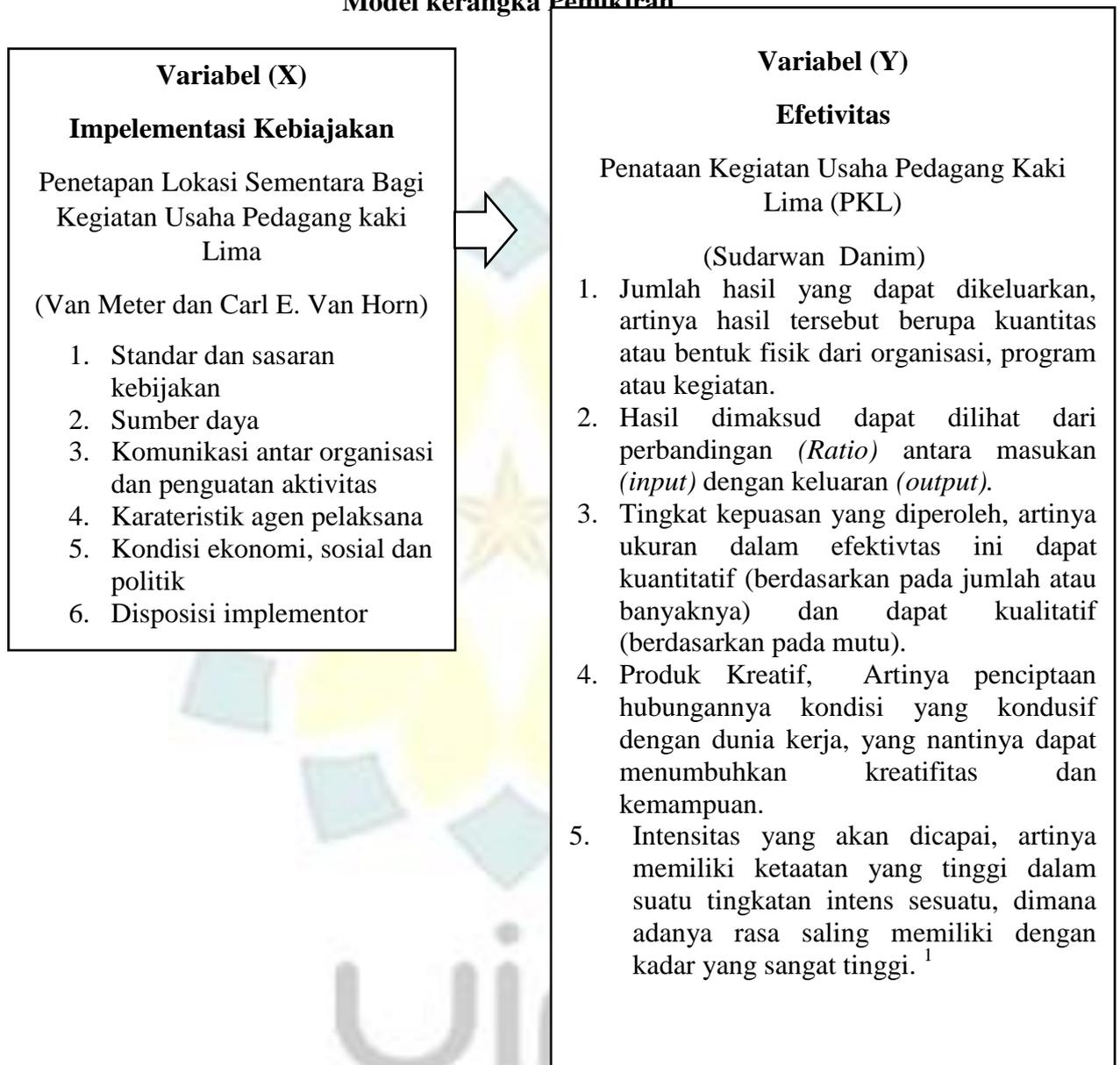
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh
3. Produk Kreatif
4. Intensitas yang akan dicapai

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis rumuskan untuk penyederhanaan model penelitian, maka model penelitian penulis sajikan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



³Ulbert Silalahi. *Asas-asas manajemen*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2013. Hal 416

Gambar 1.1
Model kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti baik problematika yang diajukan dalam penelitiannya”.

Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran.⁴

Sugiyonomengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis mengajukan dugaan atau hipotesis, yaitu :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap penataan kegiatan usaha Pedagang Kaki Limadi wilayah Kecamatan Garut Kota.

H_a : Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap penataan kegiatan usaha Pedagang Kaki Limadi wilayah Kecamatan Garut Kota.



⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, 2010, hlm. 92

⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 70